

## Kebijakan Perpajakan dan Peran Model Triple Helix berpengaruh dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kecamatan Ciawi

Tubagus Ahmad Alfi Fahmi<sup>1</sup>, Bagas Arya Agustyo<sup>2</sup>, Roby Awaludin<sup>3</sup> Arifin Billah<sup>4</sup>, Iin Rosini<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Pascasarjana, Universitas Pamulang  
email: [tubagusahmadalfifahmi@gmail.com](mailto:tubagusahmadalfifahmi@gmail.com)

### Abstract

*This study was conducted to assess the influence of tax policy and the role of the Triple Helix model on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Ciawi District. The persistent issue of low tax compliance within the MSME sector serves as the primary rationale for this investigation. A quantitative approach was applied, utilizing multiple linear regression analysis. Primary data were collected through questionnaires distributed to 95 MSME respondents, followed by instrument testing through validity, reliability, normality, and multicollinearity tests, as well as inferential statistical analysis using t-tests and F-tests. The findings indicate that tax policy exerts a positive and significant effect on MSME tax compliance, as evidenced by a regression coefficient of 0.271 with a significance level of 0.000. Furthermore, the role of the Triple Helix model—comprising collaborative engagement between government, private sector, and academic institutions—also demonstrates a positive and significant impact on tax compliance, with a regression coefficient of 0.794 at the same significance threshold. Simultaneously, these two variables collectively explain 76.4% of the variation in MSME tax compliance. These results highlight the importance of optimizing adaptive tax policies and strengthening cross-sector collaboration within the Triple Helix framework as strategic measures to enhance MSME tax compliance. The strategic implications suggest the need for tax policy reformulation and the development of sustainable collaborative models to promote higher tax compliance in the MSME sector.).*

**Keywords:** Tax policy, Triple Helix model, tax compliance, MSMEs, cross-sector collaboration

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), maupun pemerataan ekonomi. Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja

nasional (UKM, 2022). Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah, yang menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor ini (Haryanto & Lestari, 2021). Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM adalah persepsi negatif terhadap kebijakan perpajakan, seperti ketidakjelasan regulasi, beban administrasi, serta kurangnya

pemahaman atas kewajiban pajak (Siahaan et al., 2020) Penelitian oleh (Putri & Puspitasari, 2023) menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi pajak dan pengalaman subjektif mereka dalam berinteraksi dengan otoritas pajak.

Di sisi lain, strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan otoritatif dari pemerintah semata. Diperlukan sinergi antara tiga aktor utama dalam Model Triple Helix, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta (Etzkowitz & Zhou, 2018) Model ini menekankan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan inovasi kebijakan yang berbasis kebutuhan dan pemahaman lokal.

Dalam konteks perpajakan UMKM, peran Triple Helix dapat terlihat dari keterlibatan akademisi dalam edukasi dan literasi pajak, kontribusi sektor swasta seperti asosiasi UMKM dalam mendorong kepatuhan kolektif, serta reformasi kebijakan oleh pemerintah yang lebih adaptif terhadap dinamika lapangan (Nugroho et al., 2022) Studi oleh (Rahmawati & Handayani, 2024). Menggarisbawahi

bahwa keberhasilan program peningkatan kepatuhan pajak UMKM lebih efektif ketika dilandasi oleh kolaborasi lintas sektor yang saling mengisi peran.

Namun, meskipun kerangka Triple Helix telah banyak diterapkan dalam bidang inovasi dan pembangunan daerah, implementasinya dalam bidang perpajakan masih minim dieksplorasi secara komprehensif, terutama dalam konteks UMKM (Siahaan et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan dipengaruhi oleh peran aktif dari unsur-unsur Triple Helix, serta bagaimana sinergi tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, serta pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang dianalisis secara statistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dan mengukur hubungan antar variabel secara objektif.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu yang terjadi dalam populasi penelitian secara sistematis dan faktual (Nazir, 2014). Sedangkan

pendekatan asosiatif menurut (Sugiyono, 2017) bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini, pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan perpajakan dan peran Model Triple Helix terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan asosiatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran faktual kondisi di lapangan sekaligus menguji pengaruh kebijakan perpajakan dan peran Model Triple Helix dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Ciawi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Validitas

Tabel 1. Validitas pada Variabel Kepatuhan Pajak

Item	Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Y <sub>1</sub>	0,520**	0,000	Valid
Y <sub>2</sub>	0,432**	0,000	Valid
Y <sub>3</sub>	0,472**	0,000	Valid
Y <sub>4</sub>	0,463**	0,000	Valid
Y <sub>5</sub>	0,374**	0,000	Valid
Y <sub>6</sub>	0,384**	0,000	Valid
Y <sub>7</sub>	0,486**	0,000	Valid
Y <sub>8</sub>	0,463**	0,000	Valid
Y <sub>9</sub>	0,530**	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap variabel Kepatuhan Pajak (Y) menggunakan analisis korelasi Pearson Product Moment, seluruh indikator menunjukkan hasil yang

valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r) pada setiap item yang berkisar antara 0,374 hingga 0,530, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari batas kritis 0,05. Sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2017) suatu item dikatakan valid apabila memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai korelasi minimal 0,30. Oleh karena itu, seluruh indikator yang diukur dapat dinyatakan valid serta layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas pada Kebijakan Perpajakan

Item	Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1_1	0,403**	0,000	Valid
X1_2	0,432**	0,000	Valid
X1_3	0,365**	0,000	Valid
X1_4	0,432**	0,000	Valid
X1_5	0,508**	0,000	Valid
X1_6	0,463**	0,000	Valid
X1_7	0,368**	0,000	Valid
X1_8	0,372**	0,000	Valid
X1_9	0,418**	0,000	Valid
X1_10	0,432**	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap variabel Kebijakan Perpajakan (X1), seluruh indikator dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi Pearson (r) pada setiap item yang berkisar antara 0,365 hingga 0,508, dengan tingkat signifikansi 0,000, lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Menurut (Sugiyono, 2017), suatu instrumen dikatakan valid apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai korelasi lebih dari 0,30. Oleh karena itu, seluruh item pada variabel X1 telah memenuhi kriteria validitas instrumen penelitian. Dengan demikian, indikator terkait persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan prosedur pajak, keadilan sistem perpajakan, pemahaman regulasi, tarif pajak, serta pelayanan petugas pajak dianggap layak digunakan untuk mengukur persepsi dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas pada Triple Helix

Item	Korelasi (r)	Sig. (2-tailed)	Ket.
X2_1	0,393**	0,000	Valid
X2_2	0,386**	0,000	Valid
X2_3	0,459**	0,000	Valid
X2_4	0,431**	0,000	Valid
X2_5	0,386**	0,000	Valid
X2_6	0,429**	0,000	Valid
X2_7	0,490**	0,000	Valid
X2_8	0,484**	0,000	Valid
X2_9	0,353**	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Peran Model Triple Helix (X2), seluruh indikator penelitian menunjukkan nilai korelasi Pearson (r) yang berkisar antara 0,353 hingga 0,490, dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Mengacu pada pendapat (Sugiyono, 2017) instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi lebih dari 0,30 dan signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item indikator dalam variabel X2, yang mencakup peran pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung UMKM, dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Validitas yang tercapai pada variabel X2 menunjukkan bahwa peran unsur-unsur Triple Helix terukur secara konsisten dalam konteks peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Tabel. 4 Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.589	0.604	9

Sumber: Ddata Diolah (2025)

Tabel. 5 Hasil Uji Reabilitas

Kebijakan Perpajakan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.652	0.648	10

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,652 untuk Kebijakan Perpajakan (X) yang terdiri dari 10 item pernyataan. Menurut (Ghozali, 2018) instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's Alpha > 0,60 (Hair et al., 2014) juga menyebutkan bahwa nilai di atas 0,60 dapat diterima dalam penelitian sosial.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,589 untuk Kepatuhan pajak (Y) dengan jumlah 9 item pernyataan. Menurut pendapat (Ghozali, 2018), instrumen dapat dikategorikan reliable jika nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60. Namun, Hair et al. (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian eksploratori atau pada tahap awal pengembangan instrumen, nilai Cronbach's Alpha di atas 0,50 masih dapat diterima.

Tabel. 6 Hasil Uji Reabilitas Model Triple Helix

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.514	0.626	9

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,626 untuk model triple helix (X2) yang terdiri dari 9 item pernyataan. (Ghozali, 2018), nilai Cronbach's Alpha di bawah 0,60 menunjukkan bahwa instrumen tersebut reliabel.

Tabel. 7 Hasil Uji Normalitas

Correlations			T_X1	T_X2	T_Y
Spearman's rho	Kepatuhan Pajak X1	Correlation Coefficient	1.000	0.017	,246*
		Sig. (2-tailed)		0.867	0.016
		N	95	95	95
	Kebijakan Perpajakan X2	Correlation Coefficient	0.017	1.000	,822**
		Sig. (2-tailed)	0.867		0.000
		N	95	95	95
	Kepatuhan Pajak Y	Correlation Coefficient	,246*	,822**	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.016	0.000	
		N	95	95	95

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis korelasi Spearman, diketahui bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel Kebijakan Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Pajak, ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,246 dengan tingkat signifikansi 0,016 ( $p < 0,05$ ). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kebijakan perpajakan, maka tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat, meskipun kekuatan hubungan berada pada kategori lemah.

Sementara itu, variabel Peran Model Triple Helix menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan dengan Kepatuhan Pajak, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,822 dan tingkat signifikansi 0,000 ( $p < 0,01$ ). Temuan ini menguatkan argumen bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi berperan penting mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Adapun hubungan antara kedua variabel independen, yaitu Kebijakan

Perpajakan dan Peran Model Triple Helix, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,017 dengan tingkat signifikansi 0,867 ( $p > 0,05$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berdiri sebagai faktor independen dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM.

**Tabel. 8 Hasil Uji Multikolineritas**

Collinearity Diagnostics <sup>a</sup>						
Model		Eigen value	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Total_X1	Total_X2
1	1	2.993	1.000	0.00	0.00	0.00
	2	0.005	24.062	0.02	0.21	0.80
	3	0.001	46.071	0.98	0.79	0.20

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Diolah (2025)

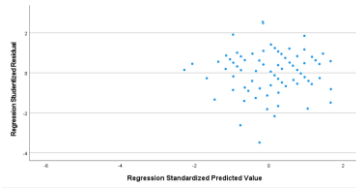
Berdasarkan hasil analisis Collinearity Diagnostics, diperoleh bahwa nilai Condition Index mencapai angka tertinggi sebesar 46,071 pada dimensi ketiga. Menurut (Hair et al., 2014), nilai Condition Index di atas 30 dapat mengindikasikan adanya potensi masalah multikolinearitas dalam model regresi 0,867 ( $p > 0,05$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berdiri sebagai faktor independen dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Hal ini diperkuat oleh proporsi varians yang cukup besar pada dimensi ketiga, di mana variabel Total\_X1 memiliki proporsi varians sebesar 0,79 dan konstanta sebesar 0,98. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dari variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh dimensi yang sama, yang menjadi indikasi adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen

dalam model.

### Gambar. 2 Hasil Uji

#### Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan scatterplot antara *Regression Standardized Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual* pada variabel dependen Kepatuhan Pajak, diperoleh gambaran bahwa sebaran residual menunjukkan pola yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik linier maupun melengkung. Sebaran tersebut mengindikasikan bahwa asumsi linearitas dan homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi, di mana varians residual tampak relatif seragam di seluruh rentang nilai prediksi.

Mayoritas titik residual berada dalam kisaran  $\pm 2$ , yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengamatan tidak memiliki penyimpangan yang signifikan terhadap model. Namun demikian, terdapat satu titik yang terletak cukup jauh di sebelah kiri bawah grafik, dengan nilai prediksi terstandarisasi mendekati -6. Keberadaan titik ini menunjukkan adanya potensi outlier atau leverage point yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil estimasi model regresi.

Tidak ditemukannya pola residual yang sistematis atau indikasi adanya heteroskedastisitas, serta penyebaran titik yang relatif merata di sepanjang

sumbu horizontal, semakin memperkuat bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi asumsi dasar regresi linear secara umum.

### Tabel. 9 Hasil Uji Koefisien

#### Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 <sup>a</sup>	0.764	0.759	1.477
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Perpajakan, Model Triple Helix				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak				

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,764, yang berarti bahwa variabel independen Kebijakan Perpajakan dan Model Triple Helix mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen Kepatuhan Pajak sebesar 76,4%. Nilai ini menunjukkan kekuatan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel independen dengan variabel dependen.

Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,759 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan terhadap jumlah variabel dalam model, sebesar 75,9% variasi dari Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh kebijakan perpajakan dan peran model Triple Helix. Sementara itu, nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1,477 menunjukkan seberapa jauh data observasi menyebar dari garis regresi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang baik dalam menjelaskan pengaruh kebijakan perpajakan dan peran model Triple Helix terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

### Tabel. 10 Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	650.269	2	325.134	149.087	.000 <sup>b</sup>

Residual	200.637	92	2.181		
Total	850.905	94			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak					
b. Predictors: (Constant), Kebijakan Perpajakan, Model Triple Helix					

Sumber: Data Diolah (2025)

Merujuk pada hasil uji ANOVA, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang melibatkan variabel independen Kebijakan Perpajakan dan Model Triple Helix secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Pajak.

Selain itu, nilai F hitung sebesar 149,087, yang jauh melebihi nilai F tabel pada taraf signifikansi yang sama, menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun memiliki kelayakan secara statistik untuk digunakan dalam memprediksi tingkat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Dengan demikian, secara empiris dapat disimpulkan bahwa baik kebijakan perpajakan maupun peran Model Triple Helix berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

**Tabel. 11 Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-3.988	3.207		-1.244	0.217
Kebijakan Perpajakan	0.271	0.060	0.230	4.546	0.000
Model Triple Helix	0.794	0.048	0.840	16.596	0.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak					

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi

linear berganda yang ditampilkan pada tabel Coefficients, diketahui bahwa variabel Kebijakan Perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,271 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, semakin baik kebijakan perpajakan, maka tingkat Kepatuhan Pajak cenderung meningkat. Selanjutnya, variabel Peran Model Triple Helix diperoleh nilai koefisien sebesar 0,794 dengan signifikansi 0,000, yang juga signifikan pada taraf 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa peran kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam kerangka Triple Helix memiliki kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai koefisien beta standar sebesar 0,840, yang lebih tinggi dibandingkan variabel Kebijakan Perpajakan. Dengan demikian, kedua variabel independen dalam model penelitian ini dapat disimpulkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kecamatan Ciawi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan perpajakan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM (Y). Hal tersebut didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05, serta koefisien regresi sebesar 0,271. Dengan demikian, semakin positif persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi kebijakan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh pelaku usaha tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Putra dan Santoso 2020), (Nugroho et al., 2022) serta Sari dan Rahayu (2018), yang secara konsisten menunjukkan bahwa kesederhanaan prosedur, kejelasan regulasi, dan kebijakan insentif perpajakan

merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak sektor UMKM.

Selanjutnya, hipotesis kedua (H2) juga dapat diterima, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa peran model Triple Helix ( $X_2$ ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM (Y). Hasil ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,794. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi strategis antara unsur pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam kerangka Triple Helix memberikan kontribusi substansial dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Hasil ini didukung oleh penelitian (Rohmah dan Arifin 2021), Mulyani dan Hermawan (2020), serta Kurniawan dan Safitri (2022), yang menunjukkan bahwa interaksi sinergis antar unsur Triple Helix mampu memperkuat literasi perpajakan serta pendampingan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Adapun hipotesis ketiga (H3) dapat dinyatakan diterima, di mana hasil pengujian simultan membuktikan bahwa kebijakan perpajakan ( $X_1$ ) dan peran model Triple Helix ( $X_2$ ) secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM (Y). Hal ini tercermin dari nilai R Square sebesar 0,764, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 76,4% variasi dari variabel kepatuhan pajak. Hasil uji F yang menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 semakin menguatkan bahwa

model regresi yang digunakan memiliki kelayakan secara statistik untuk digunakan dalam memprediksi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hartati dan Nugraha (2019), Pramudito dan Yuliana (2021), serta Ardiyanto dan Lestari (2020), yang menegaskan bahwa kombinasi kebijakan perpajakan dan peran aktif Triple Helix berkontribusi secara simultan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor UMKM. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik secara parsial maupun simultan, kebijakan perpajakan dan peran model Triple Helix berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, optimalisasi kualitas kebijakan perpajakan serta penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan tinggi merupakan strategi penting yang perlu diintensifkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

## 5. REFERENSI

- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2018). *The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation and Entrepreneurship*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781315145220>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th (ed.)). Pearson Education Limited.
- Haryanto, D., & Lestari, A. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Nasional*, 8(1), 22–36.
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, H. W., Sari, R. A., & Prasetyo, A. R. (2022). Triple Helix model dan peranannya dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM: Studi kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan*, 9(1), 115–129.



- Putri, W. P., & Puspitasari, N. (2023). Literasi perpajakan dan kepatuhan UMKM di masa pemulihan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer*, 7(2), 134–149.
- Rahmawati, F., & Handayani, D. (2024). Sinergi triple helix dalam peningkatan kepatuhan pajak sektor informal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah*, 12(1), 89–102.
- Siahaan, R. D., Simanjuntak, T., & Pane, B. M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 100–112.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- UKM, K. K. dan. (2022). *Statistik UMKM tahun 2022*. <https://www.depkop.go.id>

